

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 213.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Indonesia: Gugatan, Permohonan, dan Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 758, 762.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 28.
- Lubis, M. Ali & Muhammad Hidayat. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 88.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 45.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm. 72.

Jurnal

- Dara Mahesti & Risti Dwi Ramasari, “*Tinjauan Yuridis Hak Keperdataan Terhadap Dampak Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak (Studi di Lampung Utara)*”, Jurnal Cakrawala Ilmiah, Vol. 1, No. 5, 2022, hlm. 861–868, Doi: <https://doi.org/10.53625/jcjjurnalcakrawalailmiah.v1i5.897>.
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, & Hassanain Haykal, “*Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*”, Jurnal

Konstitusi 19, no. 2 (2022): hlm. 268. Doi: <https://doi.org/10.31078/jk1922>

I Nyoman Aditya Nugraha & I Made Sarjana, “*Perubahan Nama pada Akta Kelahiran dalam Hukum Perdata di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung*”, Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 1, No. 4, Desember 2023, hlm. 288–302, Doi: <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.757>.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Herziene Inlandsch Reglement (HIR) didalam *Burgerlijk Wetboek* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1847 Nomor 23

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1479.

Internet

Mahkamah Agung RI. (2023). Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Diakses dari: <https://sipp.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 16 Juni 2025